

# TRIWULAN I LAPORAN KINERJA



Stasiun KIPM Yogyakarta  
Tahun 2024



Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat Tahun 2024

Stasiun KIPM Yogyakarta Implementasi INPRES No. 01 Tahun 2017

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Triwulan I Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2023 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2020-2024, Renja 2024 serta Manual IKU 2024. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Triwulan I sehingga data capaian merupakan data awal pada tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 5 April 2024  
Plt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



  
M. Taufiq Trisna Jaya

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas akuntabilitas dalam penerapan *good governance* menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan evaluasi kegiatan dan Tata Cara Reviu atas Laporan evaluasi kegiatan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2024 serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta. Dalam laporan kinerja disampaikan keberhasilan dan kendala dalam pencapaian kegiatan yang telah ditargetkan.

## 1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2024 dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

## 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;

4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
6. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
  - a. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - b. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
  - c. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
  - d. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
  - e. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
  - f. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia sebanyak 17 ASN, 5 PPNPN dan 7 Outsourcing. ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 9 pejabat fungsional tertentu dan 7 fungsional umum

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

#### 1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi dan Misi

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selaku salah satu UPT dari BKIPM, Stasiun KIPM Yogyakarta harus mewujudkan visi dan misi yang telah dijabarkan di atas.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM turut bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,



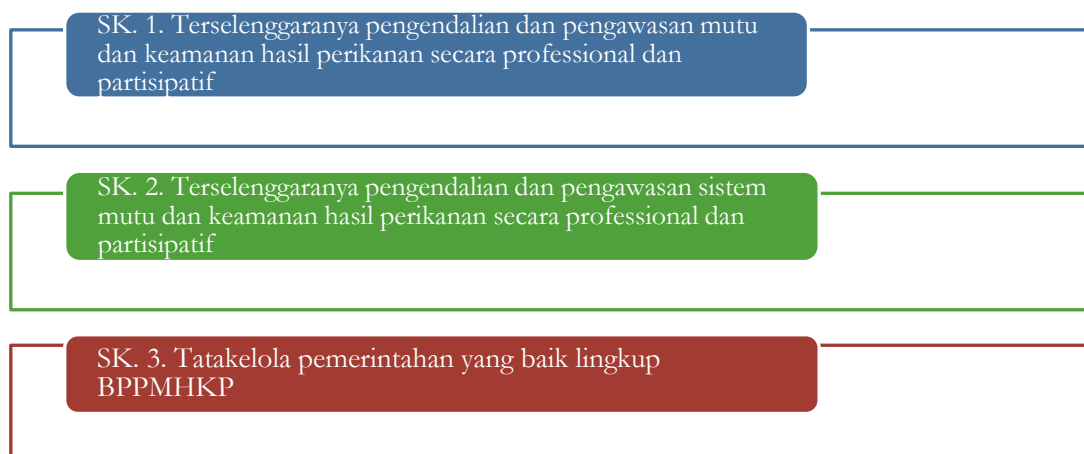
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta

Gambar 2.1. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024



Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2024 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah

ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	98	98	98	98	98
	2 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	2	5	5	5	6
	3 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	2	2	2	2	2
	4 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk)	3	4	10	10	10
	5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	2	2	4	4	5
2 Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	-	-	84	84	88.31
	7 Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	-	-	-	3	2
3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	8 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdikat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	-	-	-	75	75
	9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	72	73	83	83	86
	10 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	85	85	85	85	82
	11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	-	-	100	100	100
	12 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM	-	-	70	75	80

		Yogyakarta (%)					
	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88	89	89	89	93,76
	14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	-	86	81	86	82
	15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	-	-	75	77,5	80
	16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	-	-	75	77,5	80

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$NPSS = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$

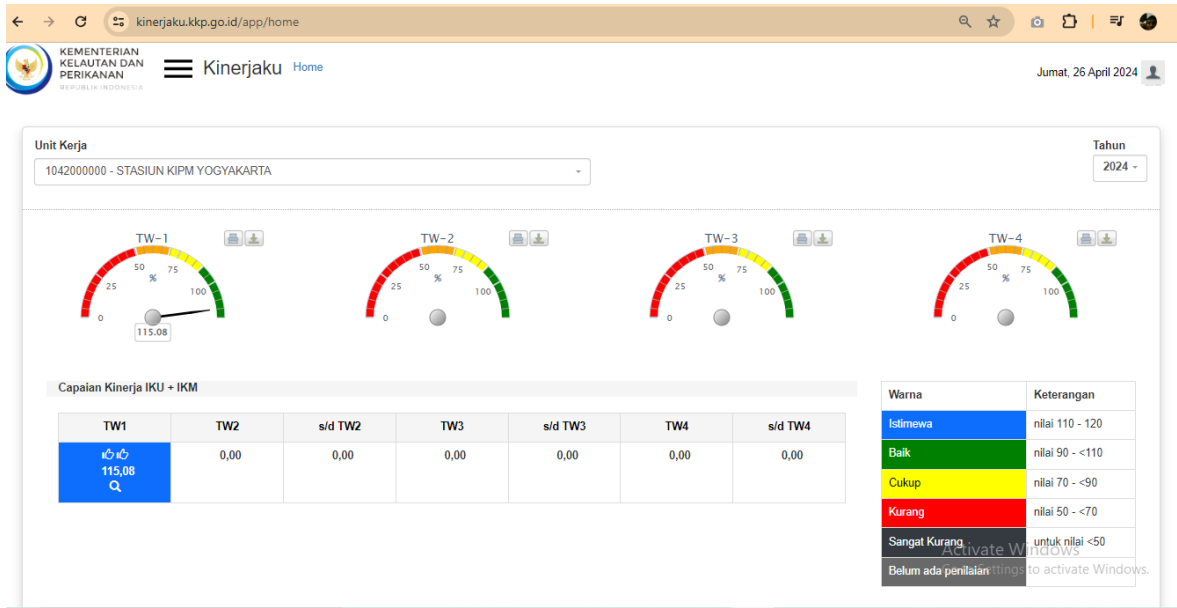
Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	≥ 110 - 120 + IDE BARU
BAIK	≥ 90 - <120
CUKUP	≥ 70 - <90
KURANG	≥ 50 - <70
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja**

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu 115,08 lebih tinggi dari NPSS Triwulan I tahun 2023 yaitu 105,77 Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah 90 - ≤ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan I			% terhadap Target 2024	Realisasi 2023	% terhadap Realisasi 2023
				Target	Realisasi	(%)			
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif								
IK1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	%	98	98	100	102,04	102,04	100	100

	lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)								
IK2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	Loka si	6	2	3	120	50	6	50
IK3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI) (IK)	UPI	2	-	-	-	-	2	-
IK4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk) (IKU)	Prod uk	10	-	-	-	-	19	-
IK5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	UPI	5	2	3	120	60	6	50
SK2	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif								
IK6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	88.31	88.31	98.23	111.23	111.23	95	103.4
IK7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	Loka si	2	-	-	-	-	4	-
SK3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP								
IK8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdiklat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	UPT	75	-	-	-	-	88,30	-
IK9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	Indek s	86	-	-	-	-	88,36	-
IK10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	82	-	-	-	-	97,75	-
IK11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Perse n	100	-	-	-	-	100	-
IK12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Perse n	80	80	100	120	120	100	100
IK13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	93,76	-	-	-	-	96,33	-

IK14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	Nilai	82	-	-	-	-	86,27	-
IK15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	78,26	-
IK16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	98,86	-

### 3.2. Analisis dan Evaluasi

#### *Sasaran kegiatan 1.*

#### **Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif**

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Triwulan I Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan I			% terhadap Target 2024	Renstra 2020-2024	
				Target	Realisasi	%		Target	%
<b>SK1</b>	<b>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif</b>								
IK1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	98	98	100	102,04	102,04	98	102,04
IK2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	Loka si	6	2	3	120	50	5	60

<b>IK3</b>	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI) (IK)	UPI	2	-	-	-	-	2	-
<b>IK4</b>	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk) (IKU)	Produk	10	-	-	-	-	10	-
<b>IK5</b>	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	UPI	5	2	3	120	60	5	60

### IK1 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan sertifikat mutu ikan (HC mutu) UPT Stasiun KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) dikalikan 100%, seperti yang tertera pada tabel 3.3

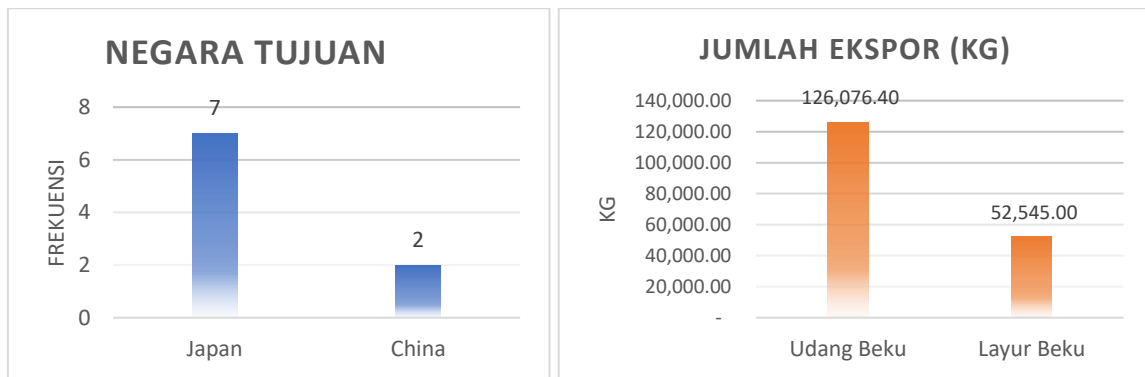
#### Penerbitan sertifikat kesehatan/ Helath Sertifikat (HC) Ekspor LINGKUP UPT STASIUN KIPM YOGYAKARTA TAHUN 2024

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta

BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT EKSPOR					JUMLAH PENOLAKAN	% Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan
	KI-D1	Mutu E (Jepang)	Mutu F (Amerika Serikat)	Mutu G (Taiwan)	Mutu B (China)		
Januari	0	2	0	0	1	0	100
Februari	0	2	0	0	1	0	100
Maret	0	3	0	0	0	0	100
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2024, sertifikat ekspor baik KI-D1 maupun sertifikat ekspor mutu yang memenuhi syarat sejumlah 9 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan ini mencapai 100% dari target 98% sehingga secara persentase tercapai 102,04%. Realisasi ini (100%) juga sama dengan realisasi pada akhir tahun lalu 2023 dimana semua ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan. Berdasarkan Tabel 3.2. terlihat realisasi triwulan ini (100%) telah melebihi target akhir periode Renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan (98%)

Tabel 3.4. Sertifikasi Ekspor berdasarkan negara Tujuan dan jumlah ekspor



Negara tujuan ekspor utama melalui Stasiun KIPM Yogyakarta adalah Jepang dengan komoditas udang diikuti dengan negara China dengan komoditas layur beku. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM Yogyakarta, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu dan inspektur karantina yang ada di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

Kendala yang dihadapi dari kegiatan ekspor adalah masih ada beberapa UPI yang melakukan ekspor namun tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu melalui tempat pengeluaran lain, sehingga data ekspor menjadi tidak tercatat. Untuk itu BKIPM Yogyakarta selalu menghimbau agar UPI melakukan pengiriman ekspor menggunakan dokumen administrasi milik UPI sendiri. Saat ini juga masih diharapkan adanya pengiriman ekspor ikan hidup melalui Stasiun KIPM Yogyakarta.

### IK2 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik merupakan yang dilakukan meliputi pengambilan sampel ikan, pengujian sampel (organoleptik, mikrobiologi, serta residu kimia)



dan juga inspeksi sarana prasarana. Pelaporan hasil pengujian dan pengamatan disampaikan ke Pusat Pengendalian Mutu BKIPM setiap triwulan.

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (modern dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Dalam satu tahun anggaran dilakukan 2 periode kegiatan ini yaitu pada semester I (Maret-April) dan semester II (September-Oktober). Target lokasi ialah 6 kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kebumen. Total lokus yang dikunjungi untuk kegiatan lapangan adalah 20 lokasi usaha

Realisasi triwulan I lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik adalah sebanyak 3 lokasi dari target triwulan I yaitu 2 lokasi sehingga tercapai 120%. Lokasi yang telah dilakukan penilaian sarpras dan pengambilan sampel yaitu sesuai tabel dibawah ini

No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Pengambilan Sampel (LOKUS)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem I)	Ket
1	Gunungkidul	Pasar Playen	27 Februari 2024	Realisasi Lokasi Triwulan I : 3 Lokasi Triwulan II : Lokasi sd Triwulan II : Lokasi Triwulan III : Lokasi sd Triwulan III : Lokasi Triwulan IV : Lokasi sd Triwulan IV : Lokasi
		Pasar Argosari		
		PPP Sadeng	5 Maret 2024	
2	Bantul	PIH Depok	7 Maret 2024	
		Pasar Niten		
		Pasar Bantul	27 Maret 2024	
3	Sleman	Pasar Gentan	29 Februari 2024	
		Lottemart		
		Pasar Condong Catur	21 Maret 2024	
		Indogrosir		

Berdasarkan hasil pengawasan masih diperlukan perbaikan untuk pasar tradisional baik sarana dan prasarana serta cara penanganan ikan. Hal serius adalah ketersediaan air bersih dan es yang masih sulit diakses oleh pedagang ikan. Hasil pengawasan yang didapatkan, akan disampaikan kepada Dinas terkait untuk dapat dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti Dinas perikanan, dinas perdagangan, BPPOM, Pemda DIY, Satpol PP dan Pendamping dari akademisi untuk bersama-sama mewujudkan pasar yang aman dan sehat. Tentu saja ada masih ada kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya penganggaran dari instansi daerah untuk melakukan tindak lanjut perbaikan baik pembenahan fisik pasar maupun pembinaan cara penanganan ikan yang baik.



Gambar Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik di Kabupaten/Kota di Wilayah DIY

### IK2.5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Definisi dari Sasaran Kegiatan ini ialah Unit usaha perikanan yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten dan menerapkan Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi: a persyaratan dasar; b. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/ HACCP dan c. penerapan Sistem Ketertelusuran. Untuk menjamin konsistensi penerapan HACCP perlu dilakukan surveilen oleh otoritas kompeten kepada UPI sesuai dengan grade yang dimiliki.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana

diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan

#### Data Surveilen HACCP sd Triwulan I

No	Nama	Provinsi	Pelaksanaan Surveilen HACCP	No SKHS	Tanggal SKHS
1	PT. Berkah Mutiara Selatan	Cilacap, Jawa Tengah	30 Januari 2024	1/38.0/SKV/02/24	29 Februari 2024
2	ASIH PUTRI MANDIRI, PT	Cilacap, Jawa Tengah	22 Februari 2024	2/38.0/SKV/03/24	26 Maret 2024
3	Hasil Melimpah Cilacap, PT	Cilacap, Jawa Tengah	27 Februari 2024	3/38.0/SKV/04/24	5 April 2024

Dari tabel diatas didapatkan informasi bahwa pelaksanaan surveilen mencapai pada 3 UPI dengan SKHS aktif sampai dengan triwulan I tahun 2024, melebihi target triwulan I sebanyak 2 UPI. Hasil dari surveilen adalah diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Surveilen (SKHS) sebagai dasar dalam penerbitan HC Ekspor. Pelaksanaan surveilen dilakukan untuk menjamin konsistensi UPI dalam menerapkan prinsip HACCP. Saat surveilen juga dapat dilakukan pengambilan sampel dalam rangka official control.



Gambar .Kegiatan Surveilen Penerapan HACCP

**Sasaran kegiatan 2.**

**Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif**

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, dan Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Triwulan I Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan I			% terhadap Target 2024	Renstra 2020 – 2024	
				Target	Realisasi	(%)		Target	%
<b>SK2</b>	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif								
IK6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	88,31	88,42	98,23	111,23	111,23	84	116,94
IK7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	Dokumen	2	-	-	-	-	2	-

### IK3.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Salah satu cara untuk mengukur kualitas suatu pelayanan publik dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM), yang selanjutnya dari pengukuran survei tersebut diperoleh suatu indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data atau informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Survei dilakukan berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan.

Survei dilakukan secara periodik yaitu pada 4 periode (4 triwulan) dalam 1 tahun. Objek survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Stasiun KIPM Yogyakarta yaitu masyarakat pelaku usaha perikanan. Survei dilakukan secara acak terhadap pengguna jasa melalui metode kuisioner di kantor pelayanan SKIPM Yogyakarta. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Tim Kerja Standarisasi dibantu oleh tim SKM.

Hasil survei dapat dijadikan dasar / bahan sebagai langkah evaluasi kinerja dan menetapkan kebijakan sebagai solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemajuan teknologi era digital, kecanggihan alat komunikasi serta kecepatan penyebaran

informasi mendorong pengetahuan masyarakat penerima layanan (produk/jasa) untuk memahami kewajiban dan hak konsumen. Hal tersebut meningkatkan standar penilaian masyarakat terhadap kinerja aparaturnya penyelenggara layanan publik.

Indeks Kepuasan Pelanggan / Pengguna Jasa terhadap pelayanan oleh Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I Tahun 2024 : 98,23. Tingkat Kepuasan Masyarakat / Pengguna Jasa adalah " A " atau SANGAT BAIK. Realisasi tercapai melebihi target IKM triwulan I yaitu 88,31.



Gambar 3.11. NILAI IKM Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I 2024

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja nilai capaian pada survei kepuasan masyarakat (SKM) antara lain :

- Proses pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha
- Sosialisasi terhadap pengguna jasa sehingga memahami proses bisnis dan standar operasional standar pada bisnis proses Stasiun KIPM Yogyakarta,
- SDM / Petugas layanan yang senantiasa melayani dengan dedikasi dan etos kerja yang tinggi

Dari hasil evaluasi pelaksanaannya proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat konsisten tercapai, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- Komitmen terhadap janji layanan
- Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima untuk petugas layanan

- c. Dukungan sarana dan prasarana layanan
- d. Sosialisasi terhadap proses pengisian indeks kepuasan Masyarakat

### Sasaran kegiatan 3.

#### Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP

Sasaran Kegiatan tata Kelola pemerintahan yang baik dicapai melalui indikator kinerja Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdiklat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta. Untuk triwulan I tahun 2024 hanya ada target Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Triwulan I Tahun 2023

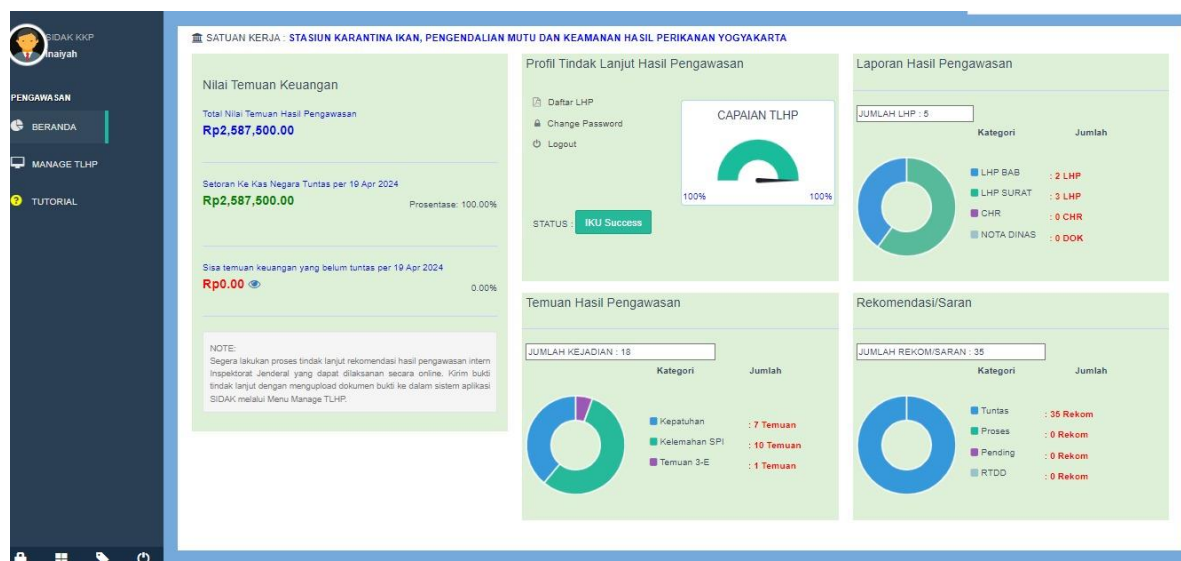
Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan I			% terhadap Target 2024	Renstra 2020 - 2024	
				Target	Realisasi	(%)		Target	%
<b>SK3</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP</b>								
IK8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdiklat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	UPT	75	-	-	-	-	75	-
IK9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	Indeks	86	-	-	-	-	86	-
IK10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	82	-	-	-	-	82	-
IK11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Persentase	100	-	-	-	-	100	-
IK12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	Persentase	80	80	100	120	120	80	120
IK13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	93,76	-	-	-	-	89	-

IK14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) (IKU)	Nilai	82	-	-	-	-	82	-
IK15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	77,5	-
IK16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%) (IK)	Perse n	80	-	-	-	-	77,5	-

**IK12. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta**

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit dan telah ditindak lanjuti (berstatus tuntas) oleh objek pengawasan.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan Audit Kinerja bulan Maret 2023. Kemudian Evaluasi atas Implementasi PNPB dan Pelayanan Publik pada Stasiun KIPM Yogyakarta oleh Itjen pada bulan September dimana seluruh rekomendasi maupun temuan juga telah ditindaklanjuti oleh Stasiun KIPM Yogyakarta. Setelah itu belum ada lagi audit pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Dengan demikian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024 adalah masih sebesar 100% dari target sebesar 80%.





### 3.3. Realisasi Anggaran

#### 3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah Rp 5.045.705.000. Anggaran tersebut telah dipotong karena adanya perubahan organisasi yaitu perpindahan 24 pegawai ke Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Yogyakarta sehingga Kegiatan Karantina Ikan sudah bergeser ke BKHIT Yogyakarta. Selain itu saat ini juga masih ada blokir anggaran sebesar Rp. 1.021.500.000 pada kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I tahun 2024 mencapai Rp 1.302,370.312 atau sebesar 25,81%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sd Triwulan I Tahun 2024

NO	Kode   Nama Kegiatan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	3987   Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3,785,055,000	1,259,848,557	33.28	2,525,206,443
2	3989   Pengendalian Mutu	239,150,000	42,521,755	17.78	196,628,245
3	3990   Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	1,021,500,000	-	-	1,021,500,000
<b>TOTAL</b>		<b>5,045,705,000</b>	<b>1,302,370,312</b>	<b>25.81</b>	<b>3,743,334,688</b>

#### 3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Pengendalian Mutu dan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
  - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
  - b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan
  - c. Layanan Sarana Internal
  - d. Layanan Manajemen SDM
  - e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
  - f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
  - g. Layanan Manajemen Keuangan
  - h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
  
2. Pengendalian Mutu
  - a. Sertifikasi CPIB pada supplier hasil perikanan
  - b. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
  - c. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
  - d. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
  - e. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  
4. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
  - a. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
  - b. Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan
  - c. Unit kerja yang menerapkan standar sistem

### **3.3.3. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 85 orang ASN (Mutu dan Karantina)	Jumlah SDM setelah adanya reorganisasi saat ini sebanyak 17 orang ASN dibantu 4 PPNPN	Masih dibutuhkan banyak SDM untuk menjalankan organisasi yang baru dengan tupoksi yang baru	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar
Kondisi anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pada organisasi yan baru dan ketugasan yang baru	Saat ini SOTK UPT BPPMHKP belum disahkan sehingga anggaran belum dapat digunakan pada kegiatan tertentu	Masih membutuhkan kepastian sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi	Mendorong disahkannya SOTK yang baru agar anggaran dapat dicukupi dan segera dapat digunakan
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar menjangkau semua kegiatan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional dan tanah

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan I Tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Tahun 2022 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 adalah 115,08
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori sangat baik.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan I Tahun 2024 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan I yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan I tahun 2024 mencapai Rp 1,302,370,312 atau sebesar 25,81% dari pagu Rp 5,045,705,000

### 4.2. Rekomendasi

- Melakukan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta secara rutin (bulanan dan triwulanan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja pada periode anggaran berikutnya
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia, selagi menunggu proses SOTK dan pembukaan blokir anggaran
- Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan offline maupun online
- Tetap melakukan pemeliharaan status akreditasi dan status WBK yang telah dimiliki